

**KONTESTASI KADER MUSLIMAT NU DALAM DOMAIN POLITIK**  
(Studi atas Partisipasi Politik Pengurus Pusat Muslimat NU Periode 2006-2011)



Oleh:  
**Hilyatul Auliya**  
**NIM: 06.234.381**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Master Studi Islam

**YOGYAKARTA**  
**2011**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hilyatul Auliya, S.Th.I

NIM : 06.234.381

Program : Megister

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya

Yogyakarta, 23 November 2010

Saya yang menyatakan



Hilyatul Auliya, S. Th. I  
06.234.381

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada YTH:

Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu`alaikum Wr. Wb*

Dengan ini disampaikan, bahwa setelah melakukan bimbingan, tela`ah, arahan dan koreksi atas naskah tesis yang berjudul:

### **KONTESTASI KADER MUSLIMAT NU DALAM DOMAIN POLITIK**

*(Studi atas Partisipasi Politik Pengurus Pusat Muslimat NU Periode 2006-2011)*

Yang ditulis oleh:

Nama : Hilyatul Auliya, S.Th.I

NIM : 06.234.381

Program : Megister

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Megister Studi Islam.

Yogyakarta, 24 November 2010

Pembimbing



Dr. A. Yani Anshori, M. A  
NIP: 19731105 199603 1 002

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : KONTESASI KADER MUSLIMAT NU DALAM DOMAIN  
POLITIK

(Studi atas Partisipasi Politik Pengurus Pusat Muslimat NU  
Periode 2006-2011)

Nama : Hilyatul Auliya, S.Th.I.

NIM : 06.234.381

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

Sekretaris : Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

Pembimbing/Penguji : Dr. A. Yani Anshori, M.A.

Penguji : Dr. H. A. Malik Madaniy, M.A.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 8 Maret 2011

Waktu : 12.30 – 13.30 WIB

Hasil/Nilai : A- / 3,50

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude\*



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PROGRAM PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : KONTESTASI KADER MUSLIMAT NU DALAM DOMAIN  
POLITIK  
(Studi atas Partisipasi Politik Pengurus Pusat Muslimat NU  
Periode 2006-2011)  
Nama : Hilyatul Auliya, S.Th.I.  
NIM : 06.234.381  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam  
Tanggal Ujian : 8 Maret 2011

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta, 24 Maret 2011

↳ Direktur,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
NIP. 19641008 199103 1 002

## Motto

❁ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ  
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) Hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu [ QS An Nur: 35]

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bermaksud mengetahui partisipasi Pengurus Pusat Muslimat NU periode 2006-2011. Sebagaimana diketahui bahwa di era reformasi, kemunculan partai politik bak cendawan di musim hujan yang menawarkan sensualitas agar layak pilih. Hal ini tidak mengherankan mengingat Muslimat NU dengan basis massa yang besar, merupakan primadona di pentas pendulang suara. Sejauhmana daya tahan Muslimat NU dalam menghadapi hasrat politik tersebut, adakah kontribusi yang signifikan atas keterlibatan kadernya di wilayah politik bagi Muslimat NU.

Dengan permasalahan penelitian tersebut, maka digunakan kerangka teori; *pertama*, Muslimat NU sebagai bagian dari gerakan sosial. Secara formal gerakan sosial didefinisikan sebagai suatu kolektivitas yang melakukan kegiatan dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menunjang atau menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok yang mencakup kolektivitas itu sendiri. Gerakan sosial lahir pada mulanya sebagai suatu kelompok orang yang tidak puas terhadap keadaan. *Kedua*, partisipasi politik pengurus pusat Muslimat NU sebagai individu. Individu yang terlibat sebagai pengurus dalam Pimpinan Pusat Muslimat NU. Pimpinan pusat Muslimat NU merupakan pemegang kebijakan tertinggi dalam organisasi dan penanggungjawab pelaksana keputusan kongres dan partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi politik dengan metode institusional dan behavioral. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi; interview bebas terpimpin, observasi, telaah dokumenter, dan telaah kepustakaan.

Sebagai organisasi masyarakat perempuan yang menjadi badan otonom resmi Nahdlatul Ulama, Muslimat NU bisa dikatakan memiliki jumlah anggota terbesar untuk organisasi perempuan. Hal ini tentu saja sangat menggiurkan bagi para politisi untuk mengeksploitasi Muslimat NU demi memenangkan Pemilihan Umum. Namun sebagai organisasi yang bukan bersifat politis, tentu saja penetrasi yang dilakukan tidak secara langsung terhadap organisasi, namun melalui individu kadernya.

Muslimat NU merupakan organisasi masyarakat yang mengkhususkan diri pada para perempuan. Organisasi ini memang organisasi perempuannya Nahdlatul Ulama. Selain Muslimat NU, Nahdlatul Ulama sendiri memiliki badan otonom lain seperti; Fatayat NU yang merupakan organisasi pemudi NU, Gerakan Pemuda (GP) Ansor organisasi bagi pemuda NU, Ikatan Putra Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) yang merupakan wadah perjuangan putra-putri NU.

Hasil penelitian ini memperlihatkan berupa temuan bahwa, meski secara organisatoris menyatakan tidak terlibat dalam politik praktis, namun Pengurus Pusat Muslimat NU mempersilahkan para kadernya untuk terlibat dalam wilayah politik, bahkan mendapat dukungan penuh. Hal ini demi kemajuan Muslimat NU itu sendiri dan kalangan perempuan Indonesia.

Lahirnya reformasi 1998 juga berpengaruh besar terhadap sikap politik Muslimat NU. Iklim demokrasi yang memungkinkan polarisasi kekuasaan lewat system yang multi partai, serta lahirnya Partai kebangkitan Bangsa (PKB) yang notabene dari rahim Nahdlatul Ulama, membuat suara Muslimat NU tidak lagi terkonsentrasi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang lahir semasa Orde Baru sebagai fusi atas partai-partai dan golongan berbasis massa Islam.

Hal tersebut mau tidak mau membuat terjadi friksi di intern Muslimat NU. Meski berhasil diatasi dengan membebaskan kadernya untuk menentukan pilihan, namun pertarungan bergeser kepada afiliasi partai politik di Muslimat NU. Dengan kata lain, pertarungan yang sesungguhnya justru terjadi di intern Muslimat NU sendiri ketika terjadi proses pemilihan pengurusnya, seperti pemilihan ketua umum yang tidak jarang disponsori oleh partai tempat bernaung sang kandidat.

Untungnya darah dan karakter politisi nampaknya mengalir deras dalam para pengurusnya, sehingga sekeras apapun persaingan yang terjadi, toh tidak membuat retak hubungan antar individunya. Sebaliknya dengan tegas Pengurus Pusat Muslimat NU menyatakan mendukung para kadernya yang berkiprah dalam ranah politik.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis ini bersumber dari pedoman transliterasi keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet(dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	Y	Ye

### Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

### Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	karāmah al-aulyā
---------------	---------	------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

### Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	dammah	Ditulis	U

Contoh :

كتب - kataba

يذهب – yazhabu

سئل - suila

ذكر – zukira

### Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

### Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah berkat anugerah Allah SWT, penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul KONTESIASI KADER MUSLIMAT NU DALAM DOMAIN POLITIK (*Studi atas Partisipasi Politik Pengurus Pusat Muslimat NU Periode 2006-2011*).

Selesainya tesis ini tidak terlepas dari peran dan partisipasi dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musya Asy`ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Prof.Dr. H. Khoiruddin, MA selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
3. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arif, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
4. Dr. Ahmad Yani Anshari, M. A selaku dosen Pembimbing dan penguji tesis.
5. Dr. H. A. Malik Madaniy, M.A. selaku penguji tesis
6. Civitas akademika Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
7. Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama dan Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Cirebon
8. Keluargaku: Drs. H. Badawi Muh. Mura`i, M.Ag dan Hj. Aam Amiyati, S.Pd.I.  
Adik-adikku: Zuhuruz Zarqo`, S.Fil.I, Ifta Ainun Nida, S.Pt, Dliya` Nahdlatina dan Girda Rina Megadwita.

9. Noval Maliki, 13 Ksatria SPPI angkatan 2006-2007: Azani, Dedeng, Eka, Ludi, Muhatarom, Mukhlis, Najam, Pitriyah, Rahmat, Ridwan, Samad dan Zuhri, Para Pendekar Asshaf, pegiat INFEST, aktivis JARIK, Tim Gorontalo-SPKP 2009-PSKK UGM, Tim Bantaeng (Sul-Sel) dan Polewali Mandar (Sul-Bar) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Survey Meter, Tim Rembang Survei Midline PPAUD Kemendiknas, sahabatku Lilin Sukmarenjana dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak sempurna, untuk itu saran dan usulan akan sangat berharga demi perbaikan tesis ini. Sekali lagi penulis menghaturkan terima kasih.

Yogyakarta, 23 November 2010

Penulis

Hilyatul Auliya, S. Th.I

## D A F T A R I S I

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DIREKTUR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	7
D. Tela`ah Pustaka.....	7
E. Kerangka teori.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
 <b>BAB II AKAR HISTORIS DAN WATAK MUSLIMAT NU.....</b>	 <b>22</b>
A. Akar hitoris Muslimat NU.....	22
1. Melacak Jejak Masuknya Islam ke Indonesia.....	22
2. Terbentuknya Nahdlatul Ulama.....	31
3. Lahirnya Muslimat NU.....	44
B. Watak Ideologis Muslimat NU .....	55
1. Ahlusunnah Wal jama`ah.....	55
2. Fiqih dan tradisi Madzhab.....	60
3. Tasawuf.....	66
 <b>BAB III POTRET GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN.....</b>	 <b>69</b>
A. Demokrasi dan Gerakan Sosial.....	69
1. Demokrasi.....	69
2. Teori Gerakan Sosial.....	78
3. Jenis-jenis Gerakan Sosial .....	86
a. Pendekatan Teori Marxis dan Teori Neo-Marxisme.....	90
b. Pendekatan Interaksionisme.....	91
c. Pendekatan Fungsional Struktural.....	91
d. Teori Gerakan Sosial baru.....	93

e. Teori Mobilisasi Sumber Daya.....	96
B. Gerakan Sosial Keagamaan .....	98
1. Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia.....	98
2. Tipologi Gerakan Keagamaan.....	102
C. Gerakan sosial Perempuan.....	103
1. Gerakan sosial perempuan di Indonesia.....	103
2. Gerakan Sosial Muslimat NU.....	107
a. Bidang Organisasi.....	111
b. Bidang Pendidikan dan Kaderisasi.....	111
c. Bidang Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup.....	112
d. Bidang Kesehatan dan Kependudukan.....	113
e. Bidang Penerangan dan Dakwah.....	114
f. Bidang Tenaga Kerja.....	115
g. Ekonomi Koperasi dan Agrobisnis.....	116
h. Bidang Penelitian dan Pengembangan serta Komunikasi dan Informasi.....	117
i. Bidang Hukum dan Advokasi.....	118
j. Bidang Hubungan Luar Negeri.....	119
<b>BAB IV PARTISIPASI POLITIK MUSLIMAT NU.....</b>	<b>121</b>
A. Partisipasi Politik.....	121
1. Pengertian Partisipasi Politik.....	121
2. Tipologi Partisipasi politik.....	126
B. Partisipasi politik perempuan.....	134
C. Partisipasi Politik Muslimat NU dalam Lintasan Sejarah.....	139
1 Masa Kolonial Belanda.....	141
2 Masa Penjajahan Jepang.....	143
3 Masa Kemerdekaan.....	147
4 Pasca Kemerdekaan.....	150
5 Masa Orde Baru.....	152
6 Masa Reformasi.....	154
D. Partisipasi Politik Muslimat NU.....	158
1. Muslimat NU dan Partai Politik.....	158
2. Partisipasi Politik Pengurus Pusat Muslimat NU Periode 2006-2011.....	167
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>177</b>
A. Kesimpulan.....	177
B. Saran-saran.....	179
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>181</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>192</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan perempuan dalam dunia yang patriarkhis, merupakan perjuangan yang sangat melelahkan dan berat.<sup>1</sup> Limitasi atas gerak perempuan terjadi dalam berbagai lini, baik di ruang privat terlebih di ruang publik. Begitu tendensiusnya hegemoni kaum laki-laki terhadap interpretasi teks suci secara tidak langsung melahirkan kebijakan yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran kaum perempuan, maka protes terhadap dominasi kaum laki-laki pun menguat. Wacana kesetaraan genderpun diusung kaum pasangan Adam ini, sebagai protes atas marginalisasi eksistensi mereka. Laksana semak yang terbakar api, gelombang kesadaran ini pun menjalar secara cepat ke pelosok penjuru dunia, sebuah wacana yang misi utamanya menempatkan kaum perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam wilayah sosial.

---

<sup>1</sup> Marginalisasi perempuan dalam peradaban kuno dapat terlihat pada peradaban Cina, India, Babylonia, Siria, Persia, Romawi, Yunani dan Mesir. Kondisi perempuan yang memprihatinkan juga biasanya disebabkan oleh penyimpangan dalam agama. Lihat, Fatimah Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan*, terj. Burhan W. dan Kundan D.K (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2001), hlm. 17-62. Lihat juga sejarah perempuan di jazirah Arab sebelum kedatangan Islam, Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 91-134. Walaupun dalam Islam posisi perempuan sangat dihormati, tapi secara realitas tidak berbeda dengan kondisi perempuan yang “terbelenggu” budaya patriarki. Lihat juga Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 29. Dalam Islam perempuan merupakan salah satu persoalan krusial dengan perdebatan cukup tajam seputar perempuan dalam al-Qur’an. Ada dua pendapat mengenai hal ini *pertama*, golongan yang menganggap bahwa status dan kedudukan perempuan saat ini sudah sesuai dengan ajaran Islam, karena golongan ini sangat diuntungkan oleh sistem dan struktur hubungan laki-laki dan perempuan yang ada, dan berusaha untuk melanggengkannya, *kedua*, golongan ini menganggap bahwa perempuan Islam saat ini masih berada pada posisi yang sangat diskriminatif, karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender dan Islam. Lihat, Mansur Faqih, “Posisi Perempuan dalam Islam”, dalam Jurnal tarjih dan Pemikiran Islam, *Wanita dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, t.t), hlm. 22.



Perdebatan mengenai boleh tidaknya perempuan memimpin baik dalam ruang publik maupun privat, merupakan salah-satu wacana yang sering diusung dalam kesetaraan gender. Hal ini tidak mengherankan, melihat dalam tilikan sejarahnya perempuan kerap kali dijadikan bahan perdebatan<sup>2</sup> dan perebutan dalam wilayah politik, namun hak-haknya justru sering terabaikan.<sup>3</sup> Sehingga perdebatan tersebut tidak pernah akan tuntas dan selalu terkurung dalam bentuk ideologis-normatif yang selalu membawa justifikasi agama, sebuah ironi yang sangat menyedihkan mengingat gerak perempuan merupakan realitas-historis yang tak terbantahkan.

Dalam konteks Indonesia, titik tolak sejarah kebangkitan perempuan diyakini terjadi pada tahun 1921. Setelah itu, kaum perempuan kemudian melangkah memasuki periode demi periode dalam babakan sejarah, dari perjuangan melawan kolonialisme sampai akhirnya Indonesia meraih kemerdekaan. Ironisnya, kemerdekaan politik untuk bangsa dan negara tersebut

---

<sup>2</sup> Meskipun tema yang dibicarakan adalah mengenai hak-hak wanita muslim; nikah, Mahar, dan lain-sebagainya, yang *notabene* wilayah perempuan. Namun perempuan sendiri lebih sering diposisikan sebagai objek bukan subjek itu sendiri. Lihat Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 235. Dan dalam realitasnya praktik poligami yang kerap merugikan kaum perempuan masih banyak terjadi dan ditemukan dimanamana, tradisi yang telah ada sebelum kedatangan Islam ini pada awalnya memperbolehkan laki-laki menikahi perempuan tanpa batas syarat yang jelas, dan kedatangan Islam kemudian merubah tradisi tersebut bahwa poligami hanya boleh dibatasi empat orang dan dengan syarat yang ketat sang suami harus bisa bersikap adil menurut Islam, sehingga tidak keliru jika kemudian dikatakan bahwa Islam sebenarnya menggugat praktik poligami bukan mengajarkan poligami. Lihat, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes, *Ahkamul Fuqoha: Solusi Problematika Hukum Islam* (Surabaya: Lajnah Ta'lim wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur kerjasama dengan Diantama, 2005), hlm. 649.

<sup>3</sup> Perdebatan tentang hak-hak politik perempuan terbagi dalam tiga pendapat; *pertama*; pendapat konservatif yang menyatakan bahwa perempuan tidak diperkenankan terjun dalam politik., *kedua*; pendapat liberal-progresif yang menyatakan bahwa Islam sejak awal memperkenalkan perempuan dalam bidang politik, *ketiga*; pendapat apologetis yang menyatakan ada bagian wilayah politik tertentu yang sama sekali tidak terjamah oleh perempuan, menurut pendapat kelompok ini wilayah politik perempuan adalah menjadi ibu. Sedangkan hak politik perempuan dalam wacana fiqih kontemporer terbagi menjadi dua; *pertama*; pendapat dari kalangan fundamentalis., *kedua*; perempuan sejajar dengan laki-laki. Laela Ahmad, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of Modern Debate* (.....), hlm. 11, dikutip oleh Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terpikirkan* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 188-195.

belum mampu membentuk tatanan masyarakat yang memposisikan kaum perempuan dan laki-laki secara sejajar.<sup>4</sup>

Gambaran secara umum akan partisipasi perempuan dalam domain politik di Indonesia memperlihatkan representasi yang minim dalam berbagai lini kehidupan politik; baik pengambilan keputusan di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi pemerintahan, partai politik dan kehidupan publik.<sup>5</sup> Maka tidak mengherankan bila kebijakan yang lahirpun kurang memihak kaum perempuan. Padahal semestinya jika pengambil kebijakan, baik laki-laki maupun perempuan, sadar akan perlunya kesetaraan gender, maka diharapkan kebijakan yang timpangpun akan bisa dihindarkan, minimal direduksi.

Sebagai sebuah aktifitas yang berada dalam domain publik, studi politik di Indonesia sangat bias gender. Sinyalemen ini dapat dilihat misalnya, bagaimana budaya dan entitas dinaturalisasi, sementara gender tidak mempertanyakan berbagai narasi politik di Indonesia. Diskursus studi politik di Indonesia dalam enam pendekatan; *state-qua-state*, *bureaucratic polity and patrimonial cluster* (negara birokratis dan kelompok patrimonial), *bureaucratic pluralism* (pluralisme birokratis), *bureaucratic-authoritarianism*, *structuralist approach*, dan *restricted pluralis* (pluralisme terbatas).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ruth Indiah Rahayu, “Politik Gender Orde Baru; Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an” dalam Liza Hadiz (ed.), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 421-422.

<sup>5</sup> Ani Sucipto, “Perempuan dan Politik di Indonesia” dalam Mursyidah Tahir (ed.) *Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*, edisi perdana (Jakarta: PP Muslimat NU dan Logos, 2000), hlm 43. Representasi perempuan dalam DPR RI pada tiap pemilu, dari pemilu 1955-2004, jumlahnya tidak lebih dari 13 %, lihat <http://www.cetro.or.id/perempuan/losari.html>. Ini sangat ironis mengingat perempuan adalah penduduk mayoritas di Indonesia. Dan representasi tersebut lebih kecil bila dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Lihat juga Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 160-161.

Dalam kontestasi politik hal yang menarik adalah adanya keputusan politik bahwa perempuan memiliki kesetaraan pada aktifitas politik yang dituangkan sebagai dasar yuridis dalam UUD`45.<sup>7</sup> Hal ini mendapat respon positif dari partai-partai politik peserta pemilu termasuk partai politik yang pada tahun 1999 pernah menolak presiden perempuan. Sungguh menakjubkan bahwa kebijakan *affirmative action* 30% quota perempuan ini juga diterima tanpa resistensi dan perdebatan yang berarti bahkan oleh para ulama dan organisasi-organisasi keagamaan garis keras.

Refleksi dari pengalaman sejak tahun 2004 memberi beberapa pembelajaran berharga. *Pertama*, mitos *sisterhood solidarity* (solidaritas perempuan). *Kedua*, dibutuhkan akulturasi proses pembelajaran dan pemaknaan baru bagi kebijakan afirmatif pada masyarakat basis sehingga ada dukungan kultural bagi gagasan tersebut dan isu ini bukan hanya jadi komoditas kelas menengah dan terpelajar di perkotaan. *Ketiga*, perjuangan kebijakan afirmatif yang seolah-olah diterima publik sebagai isu perempuan dan harus diperjuangkan kelompok perempuan sendiri jika ingin berhasil, dengan menegasikan potensi kekuatan kelompok masyarakat sipil lain, adalah keliru.<sup>8</sup>

Kaum perempuan seharusnya memaksimalkan energi politik dan sosial untuk kembali menggerakkan isu ini. Politisi perempuan diperlukan kontribusi maksimalnya melalui perjuangan mereka di partai, lintas partai, dan pada institusi politik seperti parlemen. Isu bersama saat ini, bukan kuota sebagai tujuan tetapi

---

<sup>6</sup> Ini menunjukkan *state oriented*, sedangkan kajian terhadap masyarakat sipil sangat sedikit, apalagi studi politik yang menampilkan aktivitas perempuan. Simon Philpott, *Meruntuhkan Indonesia*, terj. Nuruddin dan Uzair (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 108-109.

<sup>7</sup> <http://www.rahima.or.id/SR/10-03/Tafsir.htm>.

<sup>8</sup> <http://www.menegpp.go.id/menegpp.php?cat=detail&id=artikel&dat=345>.

bagaimana menggunakan kuota dan afirmatif sebagai instrumen mencapai tujuan dan merespons persoalan sosial masyarakat.

Muslimat Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan dengan basis perempuan dan telah menjadi primadona partai politik untuk mendulang suara ketika pemilu. Hal ini tidak bisa dielakkan mengingat Muslimat NU merupakan ormas perempuan terbesar yang fungsi utamanya mensuarakan aspirasi perempuan Nahdlatul Ulama. Tepatnya kelompok perempuan NU, sehingga mau tidak mau harus berpacu untuk turut serta dalam berbagai bidang, tidak hanya sosial keagamaan tapi juga merembes ke domain politik. Hal ini sangat wajar mengingat jika tidak berperan aktif dan berpartisipasi dalam dinamika politik bangsa, maka Muslimat NU hanya akan dimanfaatkan oleh pihak yang mengeksploitasi potensi Muslimat NU sekedar sebagai lumbung suara. Muslimat NU juga berpotensi disingkirkan ketika jika tidak mampu bersaing dalam domain penentu kebijakan di tingkat birokrat maupun partai politik.

Diperkirakan Jumlah anggota Muslimat NU mencapai 21 juta anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebuah organisasi yang telah memiliki kemapanan dengan 31 wilayah, 413 cabang ditingkat kabupaten/kota, 4.750 anak cabang di tingkat kecamatan, serta ribuan ranting di tingkat desa atau kelurahan.<sup>9</sup> Belum lagi jumlah panti asuhan, TPQ/TPA, TK, pelayanan kesehatan, koperasi, kelompok bimbingan haji dan balai latihan kerja yang dikelola oleh Muslimat NU. Hal ini membuktikan bahwa Muslimat NU termasuk organisasi perempuan yang besar dan patut diperhitungkan.

---

<sup>9</sup> PP Muslimat NU, *Laporan Pertanggungjawaban* (Jakarta: Panitia kongres Muslimat XV NU, 2006), hlm. 5.

Kendati demikian, eksistensi Muslimat NU yang potensial tersebut akan menjadi sia-sia di wilayah politik ketika tidak didukung dengan partisipasi politik para pengurusnya, sehingga ini menimbulkan sebuah pertanyaan mengapa kekuatan yang besar tersebut begitu kecil peranannya dalam kancah politik nasional?, Bagaimana keterlibatan Muslimat NU arus politik nasional?, serta bagaimana partisipasi politik kader Muslimat NU dalam domain politik?.

Maka penelitian ini mengambil objek partisipasi pengurus pusat Muslimat NU. Mengapa pengurus pusat?, karena pengurus pusat merupakan *policy maker* dan keputusan atau kebijakannya akan dijadikan acuan oleh pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang dan pengurus ranting. Hal ini akan mempunyai implikasi yang sangat besar bagi Muslimat NU di seluruh Indonesia. Sehingga kebijakan yang dihasilkan oleh Muslimat NU dalam domain politik merupakan upaya pemberdayaan politik perempuan<sup>10</sup> yang diantara perjuangannya dengan melahirkan kebijakan yang bermaslahat baik bagi *jam'iyah* Muslimat NU pada khususnya dan seluruh perempuan pada umumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan pokok yang akan dicari jawabannya dalam tesis ini, terumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kontestasi kader Muslimat NU dalam domain politik?
2. Bagaimana partisipasi politik pengurus pusat Muslimat NU periode 2006-2011?

---

<sup>10</sup> Beberapa upaya pemberdayaan politik wanita diantaranya; *pertama*; Perbaikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang menjamin proses peningkatan peranan wanita menyangkut persamaan hak dengan pri., *kedua*; Penciptaan yang kondusif bagi peranan wanita., *ketiga*; pendekatan baru yang mampu mendongkrak kultur dan struktur yang sangat patriarki., *keempat*; Memberlakukan kebijakan yang lebih peka gender. Lebih lengkap lihat Khofifah Indar Parawansa “ Peluang dan kendala perempuan di sektor publik/politik” dalam Jadul Maula (Ed.), *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi* (Yogyakarta: LKPSM, 1999), hlm. 12-13.

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan

Dengan judul “Kontestasi Muslimat NU dalam Domain Politik (Studi atas Partisipasi Politik Pengurus Pusat Muslimat NU periode 2006-2011)”, penelitian ini memiliki dua tujuan pokok: *Pertama*, Untuk mengetahui lebih jauh posisi Muslimat NU dalam konstelasi politik nasional. *Kedua*, Untuk mengetahui implementasi posisi Muslimat NU dengan partisipasi politiknya.

#### 2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini adalah; *pertama*, memberikan kontribusi bagi pemikiran politik dalam Islam. *Kedua*, memberikan kontribusi pada berbagai pihak dalam mengimplementasi kebijakannya dengan tidak tendensius. Sehingga masyarakat lebih mengetahui eksistensi organisasi perempuan, sekaligus menghapus *stereotif* negatif tentang perempuan yang mampu beraktualisasi.

### D. Tela`ah Pustaka

Penelitian terhadap Muslimat NU<sup>11</sup> dalam domain dakwah, telah menarik beberapa kalangan untuk dijadikan objek penelitiannya. Diantaranya Sri Nurhayati yang meneliti tentang pelaksanaan dakwah oleh Muslimat NU ranting Desa Jeruk Agung kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang yang membahas bagaimana kegiatan Muslimat NU serta dampak dari berbagai kegiatan seperti pengajian terhadap masyarakat.<sup>12</sup> Agus Salim meneliti tentang problem dakwah

---

<sup>11</sup> NU sebagai objek penelitian sudah sangat banyak, sedangkan kajian terhadap Muslimat NU masih sangat terbatas. Lihat Asrorun Niam Soleh dan Sulthan Fathoni, *Kaum Muda NU dalam Lintas Sejarah*, (Jakarta: ELSAF, 2003).

Muslimat NU Ranting Karang Paningal Lakkok Kabupaten Ciamis, yang memaparkan aktivitas serta problem internal dan eksternal.<sup>13</sup> Namun mengenai kontestasi Muslimat NU dalam domain politik, masih relatif sedikit. Padahal, secara aktif pimpinan Muslimat NU baik ditingkat PP, PW, dan PC telah lama terlibat dalam pentas politik. Walaupun Muslimat NU merupakan bagian dari NU yang merupakan organisasi masyarakat bukan organisasi politik. Tapi dengan keterlibatan yang terstruktur dari para aktivis Muslimat NU dalam politik sebenarnya sangat membantu eksistensi Muslimat NU sendiri dalam berbagai kancah.

Berbagai penelitian yang pernah dilakukan terhadap Muslimat NU dalam domain politik, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Tuty Alawiyah,<sup>14</sup> yang meneliti keterlibatan tokoh Pimpinan Cabang Muslimat NU kabupaten Indramayu dalam PKB. Hasil penelitian yang dilakukan ditulis dalam bentuk skripsi tersebut merupakan studi lapangan. Tetapi penelitian tersebut masih berfokus pada perdebatan ulama tentang hak-hak politik perempuan. Sedangkan penelitian terhadap PP Muslimat belum ada.

Maka Peneliti dapat dikatakan sebagai *founding father* dalam hal penelitian mengenai kontestasi Muslimat NU dalam domain politik; studi atas partisipasi politik pengurus pusat Muslimat NU ini. Penulis juga berharap

---

<sup>12</sup> Sri Nurhayati, *Pelaksanaan Dakwah oleh Muslimat NU Ranting Desa Jeruk Agung kecamatan Srumbung Magelang*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Skripsi fakultas Dakwah, KPI, 2002)

<sup>13</sup> Agus Salim, *Problem Dakwah Muslimat NU Ranting Karang Paningal Lakkok Ciamis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Skripsi Fakultas Dakwah, KPI, 2002)

<sup>14</sup> Tuty Alawiyah, *Keterlibatan Tokoh Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Indramayu dalam PKB*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Skripsi Fakultas Syariah, Jinayah Siasyah, 1997)

penelitian ini mampu menjadi *avant garde* bagi peneliti lain yang memiliki minat untuk memperluas cakrawala pengetahuannya dalam konteks Muslimat NU.

#### **E. Kerangka Teori**

Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan kerangka teori tentang Muslimat NU sebagai organisasi/kelompok kepentingan, gerakan sosial dan partisipasi politik kadernya.

Tesis ini berjudul Kontestasi Muslimat NU dalam Domain Politik (Studi atas Partisipasi Politik Pengurus Pusat Muslimat NU periode 2006-2011). Arti kontestasi adalah kontroversi; debat.<sup>15</sup> Sedangkan kontroversi sendiri memiliki arti perdebatan, persengketaan, pertentangan.<sup>16</sup> Muslimat NU disini dilihat sebagai sebuah institusi/organisasi sosial yang merupakan bagian gerakan sosial di Indonesia, baik sebagai gerakan sosial keagamaan maupun sebagai gerakan sosial perempuan. Domain yang dimaksud pada tesis ini adalah wilayah; daerah; ranah bukan domain dalam arti nama<sup>17</sup>. Domain politik meliputi eksistensinya di lembaga politik. Mengingat secara institusi Muslimat NU dengan tegas akan berada di garda paling depan dalam perjuangan membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan yang dimaksud partisipasi politik pengurus pusat Muslimat NU adalah pengurus Muslimat NU secara individu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam wilayah politik. Data utama dalam penggalan informasi tentang kader Muslimat NU dibatasi dari pengurus periode 2006-2011.

---

<sup>15</sup> Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.729

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.730.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 339.



Ada tiga unsur pokok untuk mengetahui sebuah organisasi; *pertama*, adanya sekelompok orang.<sup>18</sup> *kedua*, adanya kerjasama dan *ketiga*, orang yang bekerjasama itu memiliki tujuan. Maka dengan diketahuinya tiga unsur tersebut maka akan diketahui berapa besar pengaruh bagi orang-orang yang bekerjasama tersebut dalam mengupayakan tujuan bersama.<sup>19</sup>

Definisi kelompok kepentingan memiliki enam substansi; *pertama*, setiap kelompok kepentingan adalah sekumpulan orang yang mengorganisasikan dirinya atas nama kepentingan tertentu. *Kedua*, adanya kepentingan yang sama, menyatukan sekelompok orang untuk bergabung membentuk organisasi dengan nama tertentu. *Ketiga*, setiap aktivitas kelompok kepentingan selalu bergandengan dengan isu publik yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. *Keempat*; setiap aktivitas yang dilakukan oleh kelompok kepentingan akan mengatasnamakan masyarakat, karena fungsinya sebagai artikulator dan mengubahnya menjadi tuntutan yang akan ditujukan pada pemerintah, atau melalui partai politik. *Kelima*; aktivitas kelompok kepentingan tidak ditujukan untuk memperoleh jabatan publik, tetapi sebagai bentuk partisipasi politik untuk mempengaruhi pemerintah atau partai politik. *Keenam*; kelompok kepentingan tidak memiliki bentuk tunggal, tergantung dari perbedaan karakteristik keorganisasian dari kelompok tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Kultur organisasi merupakan kesepakatan bersama tentang nilai yang dianut bersama dalam organisasi, dan mengikat semua orang dalam organisasi tersebut. Kultur organisasi sangat penting dalam mengimplementasikan partisipasi organisasi. Sondang P. Siagian, *Teori Pengembangan Organisasi*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1995), hlm. 27-31.

<sup>19</sup> Abdulsyani, *Manajemen Organisasi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 39

<sup>20</sup> *Ibid.*, Deden F....., hlm. 165-166. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2005), hlm. 263. Lihat Mariam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 162. *Interest groups* juga merupakan pengawas sekaligus memiliki posisi yang jelas dalam melihat fakta yang ada di masyarakat. Andrew, *Politics* (New York: Palgrave, 2002), hlm. 270.

Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk utama dari perilaku kolektif.<sup>21</sup> Secara formal didefinisikan sebagai suatu kolektivitas yang melakukan kegiatan dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menunjang atau menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok yang mencakup kolektivitas itu sendiri. Gerakan sosial lahir pada mulanya sebagai suatu kelompok orang yang tidak puas terhadap keadaan.

Gerakan sosial secara teoritis adalah sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Disini terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Karena itu kekurangan apapun di tubuh pemerintah yang menjadi sorotan. Gerakan sosial juga tidak melulu berarti anti pemerintah namun bisa juga terkadang bersikap pro terhadap pemerintah. Hal ini menandakan bahwa tidak selamanya gerakan sosial muncul dari kalangan masyarakat, tetapi bisa juga hasil rekayasa dari para pejabat pemerintah.<sup>22</sup>

Pengertian partisipasi politik menurut Samuel P Huntington adalah sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Ramlan Surbakti partisipasi

---

<sup>21</sup> Perilaku kolektif (*collective behavior*) merupakan ciri khas dari suatu masyarakat berkebudayaan kompleks. Perilaku kolektif sendiri meliputi perilaku kerumunan, perilaku massa dan gerakan sosial. Lihat, Piotr Aztompta, *Sosiologi Perubahan Sosial*, terj. Alimandan (Jakarta: Prenada, 2007).

<sup>22</sup> Juwono Sudarsono (ed.), *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik* (Jakarta: Gramedia, 1976), hlm. 24-25.

<sup>23</sup> Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 6

politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut dalam menentukan pemimpin pemerintahan.<sup>24</sup> Kegiatan warga negara biasa ini dibagi menjadi mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik. Dengan kata lain partisipasi politik merupakan perilaku politik, tetapi perilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik. Karena perilaku politik merupakan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.<sup>25</sup> Perilaku politik juga merupakan produk sosial karena tidak dapat dipisahkan dari budaya politik atau bisa diartikan sebagai sikap orientas yang khas warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem tersebut.<sup>26</sup>

Perilaku politik warga negara dalam bentuk partisipasi politik oleh Milbarth<sup>27</sup> dijelaskan dalam kaitannya dengan empat faktor utama. *Pertama* sejauh mana orang menerima perangsang politik. Seseorang yang aktif, peka dan terbuka akan memacu untuk aktif dalam kegiatan politik. *Kedua*, karakteristik pribadi seseorang, kepribadian yang terbuka, *sociable*, *ekstrovert* cenderung melakukan kegiatan politik dibandingkan kepribadian yang *introvert*. *Ketiga*, karakteristik sosial seseorang, seperti status sosial, ekonomi, kelompok ras, jenis kelamin dan termasuk dalam organisasi akan mempengaruhi partisipasi politik seseorang. *Keempat*, keadaan politik atau lingkungan politik tempat seseorang

---

<sup>24</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm 118

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 131

<sup>26</sup> Menurut Almond dan Verba dalam Sudjiono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press 1995), hlm. 12.

<sup>27</sup> Milbarth, "Political Participation", dalam Michel Rush dan Philip Althof, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 167.

dapat menemukan dirinya. seperti proses perencanaan, pengambilan keputusan, penegakkan keputusan, penyampaian pendapat, pengajuan tuntutan, dan partisipasi warga negara.

Kegiatan yang bisa dikategorikan dalam partisipasi politik adalah *pertama*, partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu adalah warga negara yang dapat diamati, bukan berupa sikap atau orientasi. Karena sikap atau orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. *Kedua*, kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan keputusan politik. *Ketiga*, kegiatan yang berhasil maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah; baik kegiatan yang dilakukan atas kesadaran sendiri maupun kegiatan yang dilakukan berdasarkan desakan, manipulasi, dan paksaan dari pihak lain (mobilisasi). *Keempat*, kegiatan mempengaruhi pemerintah dilakukan secara langsung (tanpa perantara) maupun tidak langsung (menggunakan perantara). *Kelima*, kegiatan mempengaruhi pemerintah dilakukan melalui prosedur konvensional dan tanpa kekerasan seperti ikut pemilihan umum atau melalui prosedur non-konvensional dan kekerasan, seperti demonstrasi.<sup>28</sup>

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan, mengajukan kritik, membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya partisipasi pasif berupa kegiatan mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Dengan kata lain partisipasi politik aktif berarti kegiatan yang

---

<sup>28</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami...*, hlm 141-142.

berorientasi pada proses *input* dan *output*, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi *output*.<sup>29</sup>

Sementara itu Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi empat kategori, *pertama* apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua*: spektator, adalah orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga* gladiator, artinya mereka aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. *Keempat* pengkritik, yakni dalam bentuk partisipasi nonkonvensional.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Olsen partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Dia membaginya menjadi enam lapisan yaitu pemimpin politik, aktivis politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap, dan informasi politik lainnya kepada orang lain), warga negara, marginal (orang yang jarang melakukan kontak dengan sistem politik), dan orang yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).

Partisipasi politik dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku yakni individual dan kolektif. Maksudnya seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan pada pemerintah atau kolektif. Sedangkan yang dimaksud kolektif adalah kegiatan warga negara yang secara serentak untuk mempengaruhi penguasa. Partisipasi kolektif dibedakan menjadi konvensional (seperti kegiatan pemilihan umum) dan tidak konvensional (agresif, seperti pemogokan yang tidak

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 142

<sup>30</sup> Lester Milbrath dan M.L. Goel, *Political Participation*, (Chicago: Rand McNally College Publishing, 1977) dalam *Ibid.*, hlm 143.

sah). Partisipasi tidak konvensional dibedakan menjadi dua yaitu aksi yang kuat dan aksi yang lemah, aksi ini tidak menunjukkan sifat baik atau buruk. Dalam hal ini kegiatan politik dapat dikategorikan kuat apabila memenuhi tiga kondisi berikut; bersifat anti rezim dalam arti melanggar peraturan mengenai partisipasi politik normal, mampu mengganggu fungsi pemerintahan, dan harus merupakan kegiatan yang dilakukan oleh non elit.<sup>31</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Berdasarkan tinggi rendahnya kedua hal tersebut Paige membagi partisipasi politik menjadi empat tipe: pertama, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan politik yang tinggi kepada maka partisipasi politiknya cenderung aktif. *Kedua*, jika seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan politik yang rendah kepada pemerintah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). *Ketiga*, berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tapi kepercayaan kepada pemerintah rendah. *Keempat*, apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan politik sangat tinggi maka disebut tidak aktif (pasif).<sup>32</sup>

Kedua faktor tersebut tidak berdiri sendiri, artinya tinggi rendahnya kedua faktor tersebut dipengaruhi oleh faktor lain seperti status sosial, status ekonomi, afiliasi politik, dan pengalaman berorganisasi. Hubungan faktor status sosial, status ekonomi, afiliasi politik, dan pengalaman organisasi dikelompokkan dalam variabel pengaruh, faktor kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintahan

---

<sup>31</sup> Douglas A. Hibb, Jr, *Mass Political Violence* (New York: Wiley, 1978), hlm 7. *Ibid.*, hlm. 143.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 144

dikategorikan sebagai variabel antara, lalu partisipasi politik dikategorikan sebagai variabel terpengaruh atau variabel dependen.<sup>33</sup>

Tiga unsur utama dalam proses pengambilan keputusan adalah jumlah orang yang ikut mengambil keputusan, peraturan pembuatan keputusan atau formula pengambilan keputusan dan informasi. Partisipasi yang akan ditempuh dalam proses pembuatan keputusan bergantung kepada kelengkapan dan keakuratan informasi yang tersedia. Bentuk keputusan politik (kebijakan umum) mempunyai ruang lingkup dan pengaruh yang berbeda. Kebijakan umum yang mampu menimbulkan perubahan mendasar dan menyeluruh disebut kebijakan *komprehensif*, sedangkan kebijakan umum yang menimbulkan pada permukaan dan pinggiran permasalahan saja disebut keputusan *incremental* (marjinal/tambal sulam).<sup>34</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi politik<sup>35</sup> dengan metode behavioral<sup>36</sup> dan institusional,<sup>37</sup> karena mempelajari *rules*<sup>38</sup> yang dihasilkan dari sebuah organisasi/*interest group*.<sup>39</sup> Secara teoritik, *interest group* berusaha

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 145

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 189-200.

<sup>35</sup> Sosiologi politik sebagai penyelidikan melihat keterkaitan antara masalah politik dan masyarakat, antara struktur sosial dan struktur politik, .....Lihat Michael Rush dan Philip Althop, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 291.

<sup>36</sup> Pendekatan behaviorisme menyatakan bahwa individu adalah yang secara aktual melakukan kegiatan politik. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, hlm. 131.

<sup>37</sup> R. A. W. Rhodes, "The Institutional Approach" dalam David Marsh dan Gerry Stoker (ed.), *Theory and Methods in Political Science* (London: Mcmillan Press, LTD, 1995), hlm. 42-43.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 10.

mempengaruhi kebijaksanaan tanpa benar-benar mengambil tanggung jawab untuk kekuasaan.<sup>40</sup> Esensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik pengurus pusat Muslimat NU periode 2006-2011.

## 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan pokok untuk menerangkan adanya atau apa yang ada sekarang.<sup>41</sup> Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat untuk mengungkapkan *fact finding*. Akan tetapi guna mendapatkan manfaat yang lebih luas maka akan digunakan interpretasi yang adekuat.<sup>42</sup> Jika melihat dari judul besar objek penelitian ini maka menggunakan pendekatan insttusional. Data yang dihimpun dari pendekatan institusional ini akan dikategorikan menjadi empat; *pertama*; kondisi fasilitas lembaga, *kedua*; Karakteristik kemampuan personal,

---

<sup>39</sup> B. Guy Petters, *Institutional Theory in Political Science* (London: Continuum, 2001), hlm. 112-116. David Truman mengklasifikasikan konsep kelompok menjadi empat; kelompok kategori, kelompok interaksi, kelompok institusional, dan kelompok potensial. David Truman, *The Governmental Process: Political Interests and Publik Opinion* ( New York: Knopf, 1971), hlm. 23-25 dikutip oleh Mary Grisez Kweit dan Robert W. Kweit, *Konsep dan Metode Analisa Politik*, terj. Ratnawati (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 143-145.

<sup>40</sup> David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, terj. Setiawan Abadi (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 156. Setiap sistem politik memiliki mekanisme pembuatan kebijakan publik. Terutama bagi sistem politik yang memperhatikan aspek “keinginan rakyat”, maka keberadaan sebuah kelompok masyarakat yang mengatasmakan suatu kepentingan yang khusus dan eksis dengan sendirinya. Eksistensi ini sifatnya natural, karena kepentingan merupakan bagian dari proses hidup manusia. Kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik; *Goals, nature of membership, almost unlimited number*. Lihat Deden Faturrahman dan Wawan Sobari, *Pengantar ilmu Politik* (Malang: Penerbitan Universtas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm.163-168

<sup>41</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 125. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena sosial. Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm, 20

<sup>42</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 31.



*ketiga*; Struktur lembaga, *keempat*; proses dan mekanisme kerja.<sup>43</sup> Sedangkan pendekatan behavioral dilakukan karena peneliti ini membahas partisipasi politik yang notabene merupakan bagian dari perilaku politik kader Muslimat NU.

## 2. Pemilihan Lokasi

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah Jl. Pegadegan Timur Raya No. 2 Pancoran Jakarta Selatan 12770. Lokasi yang dipilih merupakan kantor pengurus pusat Muslimat NU, tetapi dalam pelaksanaan *interview* dengan elite Muslimat NU diadakan ditempat yang disesuaikan.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Interview bebas terpimpin; di dalam pedoman interview yang dipersiapkan pokok-pokok penting yang akan ditanyakan. Pokok-pokok pertanyaan itu disusun sesuai dengan data yang diperlukan, kemudian interviewer dapat melakukannya secara bebas, sehingga setiap informasi dapat digali secara maksimal sesuai dengan keperluan.<sup>44</sup> Interviewer akan melakukan interview dengan pengurus pusat Muslimat NU yang terlibat dalam domain politik dan telah ditentukan sebagai responden.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

- b. Observasi: pengamatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, baik observasi langsung maupun tidak langsung.<sup>45</sup>
- c. Telaah Dokumenter: metode pengumpulan data ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai objek penelitian.
- d. Telaah Kepustakaan: metode ini digunakan untuk memperoleh bahan-bahan informasi bacaan atau referensi yang berkaitan dengan objek penelitian yang dibahas.

#### 4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Karena objek penelitian ini mempelajari pandangan subjek penelitian, Mendapat informasi rinci dari beberapa orang atau tempat, dan menggeneralisasi teori-teori berdasar perspektif subjek.<sup>46</sup> Dalam penelitian kualitatif, pada awalnya belum dapat direncanakan desain yang terinci, lengkap dan pasti, yang menjadi pegangan selanjutnya selama penelitian. Oleh sebab itu, belum ada langkah-langkah yang jelas, yang dapat diikuti dari awal sampai akhir seperti halnya pada penelitian kuantitatif bahkan masalah yang akan ditentukan pun tidak dapat dirumuskan dengan jelas dan tegas.

Metode penelitian kualitatif ini berlandaskan pada pendekatan rasionalisme dalam menyusun kerangka teori dan memberi makna terhadap

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>46</sup> Creswell, J. W, *Educational Research; Planing Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, (New Jersey: Merrill Prentice Hall, 2002), hlm. 51. Dikutip oleh Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 62.

hasil penelitian. Sedangkan tata pikirnya, menggunakan tata pikir reflektif.<sup>47</sup> Tata pikir ini disebut juga dengan skema hipotetik, karena kebenarannya masih dipandang perlu untuk diuji-maknakan lagi. Juga disebut deduktif karena konstruksinya tidak berasal dari sesuatu yang bersifat empirik, tetapi berangkat dari alam pikir atau kemampuan akal budi manusia untuk mencoba membangun suatu abstraksi, teori, simplifikasi dan idealisasi dunia manusia, dan juga disebut tentatif karena konseptualisasi deduktif tersebut masih membuka kemungkinan pilihan terhadap nilai lain, yang secara reflektif harus diuji maknakan lagi.<sup>48</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar Penelitian ini mengarah pada tujuan yang diharapkan, maka akan disusun sistematika. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing membicarakan hal yang berbeda, namun saling memiliki keterkaitan. Secara rinci pembahasan masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh objek kajian secara ringkas, sebagai pengantar untuk mengikuti uraian pokok dalam penelitian ini. Pada bab ini akan dimuat juga pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tela`ah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>47</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta; Rake Sarasin, 1992), hlm. 26. Analisis kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnyamasing-masing, dan seringkali melukiskannya dalam kata-kata bukan dalam angka-angka. Sanapiah Faisal, *Format-Format.....*, hlm. 256.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

Bab dua akan membicarakan akar historisitas Muslimat NU yang diawali dengan sejarah proses masuknya Islam ke Indonesia, geneologis terbentuknya Nahdlatul Ulama, historisitas lahirnya Muslimat NU beserta watak ideologis yang melingkupinya.

Sedangkan bab tiga akan mengupas posisi Muslimat NU sebagai sebuah gerakan sosial, yang akan dimulai dengan konsep demokrasi sebagai iklim yang memungkinkan tumbuhnya gerakan sosial, makna gerakan sosial beserta sejarahnya, varian serta tipologi gerakan sosial dan diakhiri dengan kiprah Muslimat NU dalam fungsinya sebagai organisasi gerakan sosial.

Bab empat membahas tentang partisipasi politik Muslimat NU yang akan membedah meliputi partisipasi politik, tipologi partisipasi politik, partisipasi politik perempuan, partisipasi politik Muslimat NU tilikan sejarahnya, hingga partisipasi politik pengurus pusat Muslimat NU periode 2006-2011.

Sedangkan bab lima, yang merupakan bab terakhir, akan berisikan kesimpulan peneliti setelah melakukan pengkajian terhadap partisipasi politik Muslimat NU. bab ini juga berisikan saran-saran bagi peneliti berikutnya yang juga memiliki ketertarikan pada Muslimat NU sebagai objek penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Politik dan Muslimat Nahdlatul Ulama merupakan dua entitas yang berlainan, sebagai sebuah organisasi sosial perempuan berbasis keagamaan Muslimat NU jelas tidak memprioritaskan politik sebagai hal yang utama dalam program-programnya. Kendati demikian, aroma politik yang kental menyengat dapat tercium ke sudut-sudut basis masyarakat anggotanya.

Hal ini dapat dimafhumi mengingat sebagai organisasi dengan basis massa yang sangat besar Muslimat NU menebarkan wangi bagi siapapun yang berhasrat dengan kekuasaan dalam system demokrasi yang mensyaratkan dukungan mayoritas dari para konstituennya. Sehingga anggotanya yang besar jelas menarik siapapun yang ingin mereguk kemenangan.

Selain itu, sebagai sebuah organisasi perempuan keberadaan Muslimat NU dianggap memiliki soliditas yang lebih tinggi tinimbang lembaga induknya sendiri yakni Nahdlatul Ulama. Hal ini karena adanya persamaan ikatan emosional antara perempuan, namun juga disebabkan oleh adanya kesamaan nasib sebagai kaum yang sering termarginalkan dalam ranah publik.

Dari penelitian yang penulis lakukan mengenai Muslimat NU baik sebagai gerakan sosial maupun kaitan pengurus pusatnya dengan area politik, maka dapat disimpulkan dua hal:

*Pertama*, sebagai sebuah gerakan sosial yang memiliki basis masa yang signifikan, posisi Muslimat NU memiliki peran yang sangat besar sebagai sebuah organisasi yang khusus mengurus kaum perempuan ini. Kepedulianannya atas isu-isu perempuan terlihat dalam beberapa program yang dicanangkan sebagai langkah strategis yang tertuang dalam laporan pertanggungjawabannya sebagai sebuah organisasi sosial. Hal ini tidak saja menguntungkan bagi Muslimat NU maupun NU sendiri sebagai induk organisasi, namun juga pemerintah yang notabene banyak memiliki kesamaan visi dan misi dalam memajukan rakyatnya. Dengan demikian keberadaan Muslimat NU sebagai organisasi social keagamaan dengan basisi kaum perempuan jelas memiliki peran signifikan dalam hal pemberdayaan kaum perempuan dan anak-anak. Terbukti dengan banyaknya kerjasama yang dijalin antara Muslimat NU dengan berbagai lembaga dan Departemen negara.

*Kedua*, Sebagai sebuah organisasi wanita yang menjadi badan otonom langsung Nahdlatul Ulama, ternyata Muslimat NU mampu bersikap mandiri dalam hal keberpihakan mereka terhadap sebuah partai politik. Sikap ini cenderung oportunistik namun sangat realistik dengan menekankan pada kontribusi partai tersebut terhadap kepentingan warga muslimat NU, bukan semata berdasarkan watak ideologis layaknya organisasi masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang kental. Akibatnya tidak jarang terjadi perbedaan afiliasi politik antara pengurus pusat Muslimat NU dengan pengurus wilayah maupun pengurus cabang hingga rantingnya, bahkan perbedaan selera partai tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan antar pengurus pusat

sendiri. Namun terbukti, hal tersebut tidak mempengaruhi keharmonisan hubungan yang telah terjalin baik di tingkat pengurus pusat maupun pengurus wilayah dan cabang. Fenomena ini seakan menegaskan bahwa Muslimat NU, memiliki kedewasaan dalam politik yang jarang dijumpai dalam organisasi masyarakat lain. Keistimewaan tersebut bertolak belakang dengan asumsi kebanyakan orang mengenai stereotip komunitas perempuan-santri-pedesaan, basis utama kalangan Muslimat NU (nahdliyyin). Partisipasi pengurus pusat Muslimat NU menunjukkan bentuk pertanggungjawabannya sebagai warga negara dan menumbuhkan sikap politik yang cenderung fleksibel. Ini sangat diwarnai oleh paradigma Nahdlatul Ulama, induk organisasi muslimat NU, yang bercorak Aswaja dengan sikap moderat sebagai landasan berpikir mereka.

## **B. Saran-saran**

Dengan menilik hasil yang didapat dari kajian atas Strategi Politik Pengurus Muslimat NU periode 2006-2011 yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

*Pertama*, rentang yang panjang sejarah berdirinya Muslimat NU sangat memungkinkan bagi para peneliti lain untuk mengkaji kiprah politik Pengurus Muslimat NU dalam periode kepengurusan yang berbeda. Mengingat penulis hanya memfokuskan pada periode 2006-2011 yang identik di bawah kepemimpinan tokoh Muslimat NU yang sangat menarik, Khofifah Indar Parawansa. Selain itu, masa ini dianggap cukup menarik meneliti Muslimat NU mengingat NU sebagai organisasi induk Muslimat sendiri tengah menghadapi cobaan berat dengan perpecahan dikantong-kantong massanya yang tersedot

dalam berbagai partai politik. kepada dua partai politik yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selebihnya hanya tersebar ke dalam partai-partai kecil maupun besar yang telah mapan.

Namun langkah lebih realistic lagi jika Pengurus Pusat Muslimat NU melakukan pendidikan politik perempuan, dalam hal untuk kader Muslimat NU pada tiap tingkatan, mengingat pergolakan dan pergesekan politik ditingkat daerah juga sangat kental.

*Kedua*, sebagai organisasi yang besar baik ditilik dari jumlah anggota maupun wilayah penyebaran dan bidang garapannya yang membentang, sebenarnya tanggungjawab pada masyarakat bisa melakukan kerjasama dengan berbagi pihak. Banyak terdapat aspek-aspek dari Muslimat NU yang masih sangat layak untuk dijadikan bahan riset yang lebih serius. Mengingat sangat sedikit sekali kajian/penelitian tentang Muslimat NU dan kajian dalam politik merupakan bagian luar dari Muslimat NU secara institusi.

*Ketiga*, meskipun karya ini merupakan usaha maksimal dari penulis yang memakan waktu yang relatif panjang dan lama. Walaupun pada prinsipnya seharusnya dapat diselesaikan jauh lebih cepat dari yang selama ini terjadi. Hal ini juga membuat penulisan penelitian ini tertidur dalam waktu yang cukup panjang, sehingga merupakan sebuah kewajaran apabila kekurangan pasti dapat ditemukan disana-sini, meskipun hal tersebut tidak secara substansial. Meski demikian, bukan berarti karya ini merupakan hasil final dari yang penulis inginkan, sehingga penulis berencana untuk lebih memperdalam lagi tema sejenis dalam sebuah penelitian ilmiah, kalau Tuhan mengijinkan, Insya Allah.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Munir dan Sudarsono. *Aliran Modern dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Abdullah (ed.). *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor, 1987.
- Abdullah, M. Amin dkk. *Tafsir Baru: Studi Islam dalam Era Multi Kultural*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002.
- Abdullah, M. Amin. *Antara al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, terj. Hamzah. Bandung: Mizan, 2002.
- Abdullah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Abdullah, Taufiq (ed.). *Islam di Indonesia*. Jakarta: Tintamas, 1975.
- Abdulsyani. *Manajemen Organisasi*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Abdussami, Humaiddy dan Fakla AS, Ridwan (ed.). *Biografi Lima Ra'is 'Am Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: LTN dan Pustaka Pelajar, 1995.
- Al Ghazali, Imam Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin*. Juz 1, Kairo; Darul Hadits, 1992.
- Alawiyah, Tuty. *Keterlibatan Tokoh Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Indramayu dalam PKB*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Skripsi Fakultas Syariah, Jinayah Siasyah, 1997.
- Ali, Fachry dan Effendy, Bahtiar. *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*. Bandung: Mizan, 1986..
- al-Jabiri, M. Abid. *Post Tradisionalisme Islam*. terj. Ahmad Baso. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Bunyah al-Aql al-Arabi: Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah li Nuzum al-Ma'rifah fi al-Tsaqafah al-Arabiyyah (struktur Nalar Arab: Studi Kritik Analitik atas Sistem-sistem Pemikiran dalam Kebudayaan Arab)*, Beirut: Markaz Dirasah al-Wihday al-Arabiyyah, 1992, cet. IV.
- \_\_\_\_\_. *Taqwin al-Aql al-Arabi (Formasi Nalar Arab)*. Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-Arabiyyah, 1991.
- Alsa, Asmadi. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ambary, Hasan Mua'rif. *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1988.
- Amin, M. Masyhur. *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*. Yogyakarta: Al-Amin, 1996.
- Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Solo: Jatayu, 1985.
- Ananta Toer, Pramudya. *Arus Balik*. Jakarta: Hasta Mitra, 2001.
- Ani, Hajah Idrus. *Wanita Dulu, Sekarang dan Esok*. Medan: Pustaka Pelajar, 1980.

- Apter, David E. *Pengantar Analisa Politik*. terj. Setiawan Abadi. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Asmawi. *PKB, Jendela Politik Gus Dur*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999.
- Asy'ari, Hadratussyaiikh Hasyim. *Risalah Ahlussunnah Wal Jama'ah*, alih bahasa, Khoiron Nahdliyyin. Yogyakarta: LKPSM, 1999.
- Azhari, Muntaha dan Saleh, Abdul Mun'im (ed.). *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*. Jakarta: P3M, 1989.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Konteks berteologi di Indonesia Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Pergolakan Politik Islam*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Baehaqi, Imam (ed.). *Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Baso, Ahmad dkk. *Islam Pribumi: mendialogkan Agama membaca Realitas*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Benda, Harry J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit; Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Alih bahasa Daniel Dhakidae. Cet. I, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Black, Antony. *Pemikiran Politik Islam*. terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati. Jakarta: Serambi, 2006.
- Bruinessen, Martin Van. *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia: Survei Historis, Geografis dan Sosiologis*. Bandung: Mizan, 1996.
- Bryson, John M. *Perencanaan Strategis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Budiardjo, Mariam. *Partisipasi dan Partai Politik; Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. London: Yale University Press, 1989.
- \_\_\_\_\_. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. terj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Dahlan, Abdul Azis dkk. (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Dhofier, Zamakhsari. *Tradisi Pesantren, Studi Tentang pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1994.

- Djati, Arief. *Gerakan Sosial dan Demokratisasi*. Surabaya: Panitia 25 Tahun FISIP Universitas Airlangga, tt.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Esposito, John L. & Voll, John O. *Demokrasi di Negara-negara Muslim*. terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1999.
- Esposito, John L. *Islam and Politics*. Syracuse, Syracuse University, 1985.
- \_\_\_\_\_. *The Islamic Threat*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Faqih, Mansoer. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial; Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Faturrahman, Deden dan Sobari, Wawan. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Fauzi, Noer. *Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Insist Press, 2005.
- Feally, Greg dan Barton, Greg. *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan NU-Negara*. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. terj. Farid Wajidi dan Mulni Adelina Bachtar. Yogyakarta: LKIS, 1998.
- Feillard, Andree. *NU vis a vis Negara: Pencarian Bentuk, Isi dan Makna*. terj. Lesmana. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Feith, Herbert dan Castles. Lance. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Gani, Soelistyati Ismail. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Illinois: The Free of Glencoe, 1960
- Hadiz, Liza (ed.). *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 2004.
- Haidar, Ali. *Nahdlatul Ulama dan Islam; Pendekatan Fiqh dalam Politik*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Haris, Syamsuddin, "Perubahan Tingkah Laku Politik Nahdlatul Ulama Menjelang Pemilihan Umum 1987," Laporan Penelitian untuk Toyota Foundation, 1989, 39.
- Hasan, Mohammad Nuh. *Agama dalam Perspektif Sosiologis: Sebuah Pengenalan Awal*. Artikel Penelitian: UIN Jakarta, 2004.

- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang tak Terpikirkan*. Bandung: Mizan, 2001.
- Haynes, Jeyf, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil Dunia Ketiga; Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Heywood, Andrew. *Politics*, New York: Palgrave, 2002.
- Hibb, Jr, Douglas A. *Mass Political Violence*. New York: Wiley, 1978
- Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Hodgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam*. Chicago: The University of Chicago Press, 1974, vol.2.
- Shahih Bukhari, Juz, I, Beirut: Dar al-Jill, t.t.
- Shahih Muslim, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Huntington, Samuel P dan Nelson, Joan M. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Hurgronje, Snouck. *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, Jilid VII. terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, Jakarta: INIS, 1994.
- Imawan, Riswanda. *Membedah Politik Orde Baru: Catatan dari Kaki Merapi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Irsyam, Machrus. *Ulama dan Partai Politik: Mengatasi Krisis*. Jakarta: Yayasan Pengkhidmatan, 1984.
- Ismail, Faisal. *NU, Gusdurisme dan Politik Kyai*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Jasamihardja, Sutopo dkk. *19 Desember 1948, Perang Gerilya Perang Rakyat Semesta*, Jakarta: Media Aksara Grafia, 1998.
- Karim, A. Gaffar. *Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 1995.
- Karim, M. Abdul. *Islam dan Kemerdekaan Indonesia: Membongkar Marjinalisasi Peranan Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan RI*. Yogyakarta: Sumbangsih Press, 2005.
- Karim, M. Abdul. *Islam di Asia Tengah*. Yogyakarta: Bagaskara, 2006.
- Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes. *Ahkamul Fuqoha: Solusi Problematika Hukum Islam*. Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasr (LTN) NU Jawa Timur kerjasama dengan Diantama, 2005.
- Kuntowidjoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan: 1994.
- Kuntowidjoyo, *Sejarah Perjuangan Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang*. Surakarta: Yayasan Bhakti Utama, 1997.
- Kweit, Mary Grisez dan Kweit, Robert W. *Konsep dan Metode Analisa Politik*. terj. Ratnawati, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

- LP3ES. *Profil Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 1974.
- Ma`arif, Ahmad Syafi`I, *Studi tentang Peraturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Mahfudh, M. A. Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Marcoes, Lies (ed.), *Kumpulan Makalah Seminar Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS, 1993.
- Mardiyanah, Naning dkk. *Memperkuat Posisi Politik Rakyat*. Jakarta: CESDA-LP3ES, 2004.
- Marijan, Kacung. *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Marsh, David dan Stoker, Gerry (ed.). *Theory and Methods in Political Science*. London: Mcmillan Press, LTD, 1995.
- Mas`oed, Mochtar dan Andrews, Collin Mic. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, t.t.
- Masyhuri, M. Aziz. *Masalah Keagamaan; Hasil Mukhtaramar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama*. Surabaya: PP Rabithah Ma`hadil Islamiyah, 1977.
- Maula, Jadul (Ed.). *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*. Yogyakarta: LKPSM, 1999.
- Milbarth, Lester dan Goel, M.L. *Political Participation*. Chicago: Rand McNally College Publishing, 1977.
- Montana, Suwendi. *Aspect of Indonesians Archeology*, no. 16. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1994/1995.
- Morgan, Kenneth W. *Islam Jalan Lurus*. terj. Abu Salamah dan Chairil Anwar, Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.
- Muhadjir, Noeng . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta; Rake Sarasin, 1992..
- Mujani, Saiful. *Muslim Demokrat*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Mulia, Siti Musdah dan Farida, Anik. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Muzadi, A. Muchit. *NU dan Fiqh Kontekstual*. Yogyakarta: LKPSM, 1994.
- Muzadi, Hasyim. *NU di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*. Jakarta: Logos, 1999.
- Nasif, Fatimah Umar. *Menggugat Sejarah Perempuan*. terj. Burhan W dan Kundan D.K. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2001.
- Nasr, Sayyed Hosein (ed.). *Spiritualitas Islam: Manifestasi*. terj. Ruslani, dkk, Bandung: Mizan, 2003.
- Natingham, Elizabeth K. *Agama dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- \_\_\_\_\_. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Pustaka Utama graffiti, 1987
- Nurhayati, Sri. *Pelaksanaan Dakwah oleh Muslimat NU Ranting Desa Jeruk Agung kecamatan Srumbung Magelang*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Skripsi fakultas Dakwah, KPI, 2002.
- Parawansa, Khofifah Indar. *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi*. Jakarta: LP3ES, 2006
- Partokusumo, Karkono Kamajaya. *Kebudayaan Jawa, Perpaduannya dengan Islam*. Yogyakarta: IKAPIDIY, 1995
- Pasya, Mustafa Kamal dan Darban, Ahmad Adaby. *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam: dalam Perspektif Historis dan Ideologis*, cet. I. Yogyakarta: LPPI, 2000.
- Petters, B. Guy. *Institutional Theory in Political Scienc.*, London: Continuum, 2001.
- Philpott, Simon. *Meruntuhkan Indonesia*. terj. Nuruddin dan Uzair, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Pulungan, Amalia dan Abimanyu, Royseptu. *Bukan Sekedar Anti Globalisasi*. Jakarta: IGI dan WALHI, 2005.
- Putra, Fadhillah dkk. *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*. Malang: PlaCID's dan Averroes Press, 2006.
- Rahardjo, M. Dawam (ed.). *Pesantren dan Pembaruan*. Jakarta: LP3ES, 1983.
- Rahman, Arifin. *Sistem Politik Indonesia dalam Prespektif Struktural Fungsional*. Surabaya: SIC, 2002.
- Rasyid, Hamdan dkk. *KH. Abdul Wahab Chasbullah: Perintis, Pendiri dan Penggerak NU*. Jakarta: Panitia Penulisan Buku Sejarah Perjuangan KH. Abdul Wahab Chasbullah, 1999.
- Ricklefs, MC. *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Ridwan, Nur Khalik. *Doktrin Wahhabi dan Benih-benih Radikalisme Islam*. Yogyakarta: Tanah Air, 2009.
- Robert, Misel. *Teori Pergerakan Sosial*. Yogyakarta: Resist Book, 2004.
- Rozikin, Daman. *Membidik NU, Dilema Percaturan NU Pasca Khittah*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rush, Michael dan Althof, Philip. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Rush, Michael dan Althof, Philip. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

- Saksono, Widji. *Mengislamkan Tanah Jawa: Telaah atas Metode Dakwah Walisongo*, cet. II. Bandung: Mizan, 1995.
- Salim, Agus. *Problem Dakwah Muslimat NU Ranting Karang Paningal Lakkok Ciamis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Skripsi Fakultas Dakwah, KPI, 2002
- Salim, Hairus, Fauzan, Uzair dan Sholeh, Umar Ibnu (ed.). *Tujuh Mesin Pendulang Suara: Perkenalan, Prediksi, Harapan Pemilu 1999*. Yogyakarta: LKiS dan CH-PPS, 1999
- Sastroatmodjo, Sudjiono. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press 1995.
- Schroder, Peter. *Strategi Politik*, terj. Denise Joyce Matindas, Jakarta: Freiderich Naumann Stiftung, 2003.
- Siagan, Sondang P. *Teori Pengembangan Organisasi*. Yogyakarta: Bina Aksara, 1995.
- Shiddiq, Ahmad. *Khittah Nahdliyyah*. Surabaya: Balai Buku, 1980.
- Siraj, Said Aqiel. *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Situmorang, Abdul Wahab. *Gerakan Sosial; Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- So'an, Sholeh. *Tahlilan: Penelusuran Historis atas Makna Tahlilan di Indonesia*. Bandung: Agung Ilmu, 2002.
- Sodik, Mohamad. *Gejolak Santri Kota: Aktivis Muda NU Merambah jalan Lain*, cet. I. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Soebaijo I. N. *K.H. Maskur*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Soetjipto. Ani *Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: Kompas, 2005.
- Soewondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Timun Mas, 1968.
- \_\_\_\_\_. *Kedudukan Wanita Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Soleh, Asrorun Niam dan Fathoni, Sulthan. *Kaum Muda NU dalam Lintas Sejarah*. Jakarta: ELSAF, 2003.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sudarsono (ed.), Juwono. *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*. Jakarta: Gramedia, 1976.
- Suhartono. *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Bandung: Pustaka Pelajar, 1994.
- Sunarto, Astrid Susanto. *Masyarakat Indonesia Memasuki Abad ke Dua Puluh Satu*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.

- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: LPFE Ekonomi UI, 2000.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1995.
- Suryochondro, Sukanti. *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Suseno, Frans Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Susesno, Franz Magnis (dkk.). *Agama dan Demokrasi: Proceeding Seminar Sehari*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) bekerjasama dengan Friedrich Nauman Stftung (FNS), 1992.
- Sztompta, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Terj. Alimandan, Jakarta: Prenada, 2007.
- Thaha, Idris. *Demokrasi Religius, Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*. Bandung: Teraju, 2004.
- Thoha, Zainal Arifin dan Musthofa, M. Amin. *Membangun Budaya Kerakyatan: Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU*, Yogyakarta: Titian Ilmu Press, 1997.
- Treanor, Paul. terj. Imron Rosyadi dan Muhammad Nastain. *Kebohongan Demokrasi*. cet. I. Yogyakarta: Istawa-Wacana, 2001.
- Truman, David. *The Governmental Process: Political Interests and Publik Opinion*. New York: Knopf, 1971.
- Turmuzi, Endang dkk. *Nahdlatul Ulama: Ideologi, Garis Politik dan Cita Pembentukan Masyarakat*. Jakarta: PPLP Ma'arif NU, 2004.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Wahid, Abdurrahman. *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*. Jakarta: Desantara, 2001.
- Wahyudi, Agustinus Sri. *Manajemen strategik* Jakarta: Binarupa Aksara, 1996
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial: dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*. Bandung: Penerbit Mizan, 1994.
- Yasin, Rahman. *Gagasan Islam tentang Demokrasi*. Yogyakarta: AK Group, 2006.
- Zada, Khamami. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Bandung: Teraju, 2002.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Aliran Politik dan Akidah dalam Islam*. Jakarta: Logos, 1996
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS, 2004.



- Zaini, A. Wahid. *Dunia Pemikiran Kaum Santri*. Yogyakarta: LKPSM, 1994
- Zen, Fathurin. *NU Politik Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zubir, Zaiyardam. *Radikalisme Kaum Terpinggir: Studi tentang Ideologi, Isu, Strategi dan Dampak Gerakan*. Yogyakarta: Insist Press, 2002.
- Zuhri, Saefuddin. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: al-Ma'arif, 1981.

### **Kamus**

- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Depatemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Krisna, Didi. *Kamus Politik Internasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993
- Marbun. *Kamus Politik*. Jakarta: Sinar Harapan, 2005
- Munawwir, A. W. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. II. Surabaya: Pustaka Progressif, 1995.
- Outhwaite, William. *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Edisi ke-2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Riff, Michael A. *Kamus Ideologi Politik Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

### **Jurnal:**

- Jurnal, *Ulumul Qur'an*, No.4. Vol. III., (1992).
- Jurnal *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 4 Tahun 1999.
- Jurnal *Tashwirul Afkar*, No. 6. Th. 1992
- Jurnal *Tashwirul Afkar*, no. 10, th. 2001
- Jurnal al-Huda*, vol. 1, No. 2, 2002.
- Jurnal *Tarjih dan Pemikiran Islam*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, t.t.
- Jurnal *Ulumuna*, vol.VII, edisi 11 no. 1, Januari 2003.

Jurnal *Ulumul Qur'an* no.5, 1990.

*Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*, edisi perdana Jakarta: PP Muslimat NU dan Logos, 2000.

### **Document Muslimat NU**

Naskah Pidato Harlah ke 63 Muslimat NU, “Revitalisasi Institusi Layanan Muslimat NU”, Rakernas dan Harlah Muslimat NU, Makassar 28 Mei- 1 Juni 2009

Naskah Pidato ketua umum Muslimat NU pada Harlah ke-55, 29 Maret 2001, “Menyemai Perdamaian, Memperkokoh Persaudaran Menuju Indonesia Baru”. Jakarta: PP Muslimat NU, 2001

PBNU. *Hasil-hasil Mukhtamar NU ke-28*. Semarang: Al-Alawiyah, 1990.

Pimpinan Pusat Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia; Menggali Aspirasi Masa Lalu, Menyongsong Masa Depan*, Yogyakarta: PP KOWANI, 1998.

Pimpinan Pusat Muslimat NU. *Materi Rakernas Muslimat Nahdlatul Ulama: Revitalisasi Institusi Layanan Muslimat Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Pimpinan Pusat Muslimat NU , 2009.

Pimpinan Pusat Muslimat NU. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muslimat NU*. Jakarta: Pimpinan Pusat Muslimat NU periode 2006-2011.

Pimpinan Pusat Muslimat NU. *Himpunan Keputusan Kongres XV Muslimat NU*, Batam, 29 Maret-1 April 2006. Jakarta, PP Muslimat NU periode 2006-2011

Pimpinan Pusat Muslimat NU. *Laporan Pertanggungjawaban*, Jakarta: Panitia kongres Muslimat XV NU, 2006.

Pucuk Pimpinan Muslimat NU. *50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat untuk Agama, Negara dan Bangsa*, Jakarta: PP Muslimat NU, 1996.

Sekretaris Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Sekretaris Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tt.

Tim Sekretariat PP Muslimat NU. *Laporan Pertanggungjawaban*. Jakarta: Panitia Kongres XV Muslimat NU, 2006.

### **Makalah**

Nasaruddin Umar, “Tantangan Muslimat NU”, Rakernas Muslimat NU, Makassar, 29 Mei 2009

Yeis Sa`diah Ma`sum, *Workshop Peningkatan Peran Muslimat NU dalam menunjang Program KB*, Bandung: 16 Juni 2009

**Surat Kabar:**

*Harian Republika*, Kamis, 14 April 2005.

*Kompas*, 19 November 1999.

*Mitra Dialog*, 11 Maret 2009

*Duta Masyarakat*, 30 Mei 2009.

**Internet:**

[http://www.dpp-pkb.org/v2/index.php/berita/34-berita/81-keterwakilan-perempuan- di  
legislatif\\_cc38bc\\_83d\\_49fc4e5dd4c30e6144cce74=625ea5b5295d878cfdea018f0af10298](http://www.dpp-pkb.org/v2/index.php/berita/34-berita/81-keterwakilan-perempuan-di-legislatif_cc38bc_83d_49fc4e5dd4c30e6144cce74=625ea5b5295d878cfdea018f0af10298)

<http://www.cetro.or.id/perempuan/losari.html>.

<http://www.rahima.or.id/SR/10-03/Tafsir.htm>.

<http://www.menegpp.go.id/menegpp.php?cat=detail&id=artikel&dat=345>.

[www.meshkat.com](http://www.meshkat.com).

[www.nu.online.or.id](http://www.nu.online.or.id). Sejarah NU.

<http://www.kapanlagi.com/h/0000109764.html>

<http://www.dutamasyarakat.com/rubrik.php?id=24424&kat=Kolom>

<http://www.isnet.org/archive-milis/archive98/jul98/0138.html>.

<http://www.socialmovement.com> //social movement society.